

Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Selama Periode 2015-2021

Lingga Fajar Mustaqim
linggafajar26@gmail.com

Muhammad Arif²⁾
arifmdev@gmail.com

^{1) 2)} Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Regresi data panel dengan cakupan cross-sectional wilayah dan kota Provinsi Kalimantan Barat digunakan sebagai pendekatan analisis. Data deret waktu, di sisi lain, mulai dari tahun 2015 hingga 2021. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, upah minimum kabupaten/kota, Indeks Mahal Konstruksi, dan PDRB adalah variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin. Model Estimasi *Random Effect Model* (REM) dipilih sebagai model estimasi terbaik, sesuai dengan temuan analisis. Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, jumlah penduduk miskin dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Upah Minimum. Sebaliknya, kemiskinan tidak dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Mahal Konstruksi (IKK), Belanja Sektor Kesehatan (PSK), atau Belanja Sektor Pendidikan (PSP).

Kata kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Kemahalan Kontruksi, PDRB.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah mengurangi jumlah warga miskin. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengurangan jumlah penduduk miskin harus dilakukan secara sistematis. Hal itu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu melalui berbagai bidang kehidupan (Khoirudin & Musta'in, 2020).

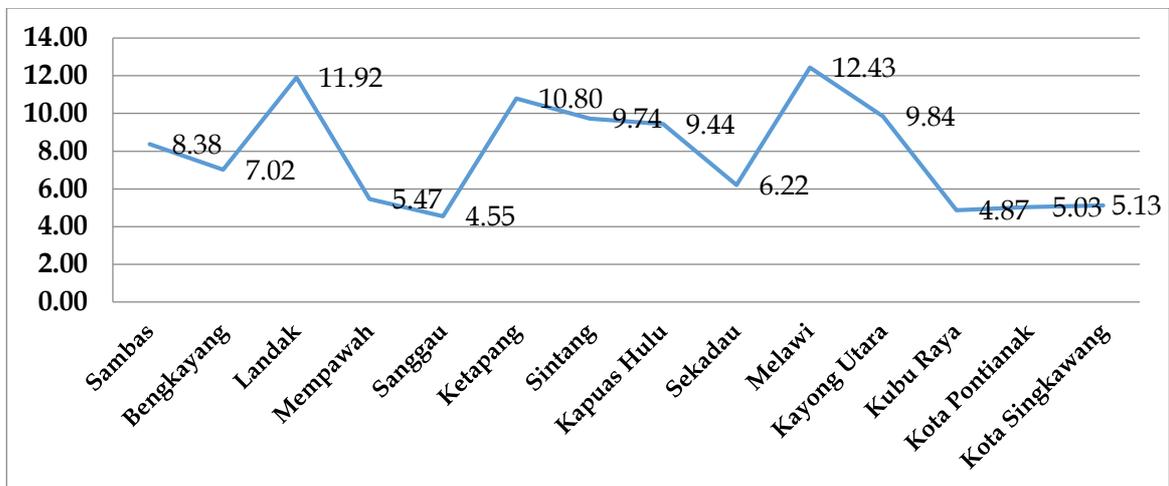
Kalimantan Barat berpotensi menjadi pendorong ekonomi di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, pertambangan, air, sumber daya manusia, dan keahlian pemrosesan akan menjadi faktor dorong pembangunan Kalimantan Barat dan ciptakan kesejahteraan bersama. Tidak hanya di provinsi ini, tetapi di seluruh negeri. Meskipun memiliki potensi kekuatan ekonomi, pembangunan provinsi tertinggal menjadi sumber ketidakadilan daerah dan berkurangnya kesejahteraan. Penundaan, aktivitas ekonomi pasar rendah, modal rendah, resesi produktifitas. Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Barat sebagai kemiskinan meningkat tahun demi tahun. Gambar 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota.

Bappenas (2018) mengatakan bahwa kesulitan mempengaruhi kebutuhan. Aksesibilitas layanan dasar pada umumnya, tidak adanya layanan kesehatan dan pelatihan masih ada kesulitan yang sering terbentang di depan, pola pikir tradisional dan kehilangan persyaratan pendidikan dan kesehatan yang memengaruhi mereka untuk SDM, pandangan yang tidak berkembang dipengaruhi oleh kinerja individu. Bersamaan dengan geologi daerah yang menyebabkan segregasi lokal, keserbagunaan populasi yang menyusahkan, pengangkutan tenaga kerja dan produk lokal mendasar dan bencana yang memperparah kebutuhan.

Pengeluaran pemerintah untuk pelatihan berhubungan negatif dengan jumlah orang miskin, pengeluaran publik datang dalam jangka panjang untuk mengurangi kebutuhan dan bekerja dengan masuk ke pendidikan. Semakin banyak orang yang mendapatkan dan menyelesaikan pelatihan ke tingkat yang semakin meningkat. Semakin tinggi persekolahan, semakin tinggi informasi dan sifat masyarakat, mendukung pembangunan efisiensi, yang dapat diandalkan dengan hipotesis sumber daya manusia yang menyatakan bahwa semakin tinggi sifat penyiapan tenaga kerja, semakin baik. Ada keseriusan yang bisa dikonsumsi oleh pekerjaan, yang pada gilirannya memperluas cara hidup ekonomi. Apalagi dengan pengeluaran pemerintah di bidang kesejahteraan untuk lebih mengembangkan status kesejahteraan daerah lokal yang lebih baik, efisiensi yang lebih baik dalam penciptaan tenaga kerja dan produk pengembangan peningkatan administrasi, yang bekerja pada norma moneter masyarakat (Widodo et al., 2012).

Provinsi Kalimantan Barat 2015-2021 dari Grafik 1.1 terlihat persentase rata-rata kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2015-2021. Persentase keseluruhan mengalami penurunan karena adanya peningkatan distribusi pendapatan di Kalimantan Barat. Rata-rata Kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Melawi sebesar 12,43%. Tinggi angka kemiskinan di Kabupaten Melawi akibat *buruknya* kualitas daya saing sumber daya manusia, kualitas regulasi, birokrasi dan *good governance* relatif kecil, mengurangi kapasitas beban dan kapasitas lingkungan, kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan akses infrastruktur dasar.

Grafik 1.1
Rata-Rata Perkembangan Pesentase Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat Periode 2015-2021(persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, dengan perkembangan normal 4,5% pada 2015-2021. Kuartal 2019 penekanannya adalah pada keringanan kebutuhan. Untuk situasi ini, misalnya kelompok usaha sosial berbadan hukum berbasis keluarga diarahkan untuk menyelesaikan pelaksanaan dasar penurunan beban hidup dan bekerja pada kepuasan pribadi, pertemuan program berbasis penguatan wilayah untuk membangun batas. Dukungan dari pertemuan lokal yang malang yang dikembangkan akhirnya memajukan kelompok karena penguatan ekonomi mikro memberikan akses dan penguatan keuangan kepada perusahaan swasta.

Faktor ekonomi lain yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah tingkat gaji. Islami et al., (2013) menemukan UMR berdampak negatif terhadap kemiskinan. Kenaikan upah minimum mengurangi beban kerja perusahaan dalam proses produksi. Penggunaan pekerjaan terbatas dan hasilnya peningkatan angka kemiskinan. Perbedaan pendapatan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Semakin rendah ketimpangan distribusi pendapatan, semakin baik distribusi pendapatan tersebut dalam masyarakat dan pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan (Rozali, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan

Kebutuhan adalah masalah dunia yang harus dirawat dan dipertahankan individu di planet ini. Negara-negara yang malang sebenarnya memiliki masalah pembangunan dan perbaikan dengan pembagian gaji yang tidak seimbang. Banyak negara agraris, bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang cepat tidak menguntungkan, kebutuhan penduduk masih tinggi. Kemelaratan tidak hanya sejauh membayar untuk mengatasi masalah makanan, tetapi juga tanda-tanda tambahan dari instruksi yang sah dan sehat. Penanda kesejahteraan dapat diperkirakan dengan melihat jumlah kelahiran bayi dan status keseluruhan anak dalam keluarga. Petunjuk pelatihan diperkirakan dengan melihat tidak kurang dari satu keluarga anak-anak yang telah menyelesaikan kelas 5 dan anak-anak yang tidak naik kelas. Dalam hal suatu keluarga tidak dapat memenuhi prasyarat dasar tersebut, maka keluarga tersebut hidup berkekurangan (Todaro & Smith, 2015).

Menurut Collins (2020), kemiskinan adalah kecacatan mendapatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan dasar mereka dan untuk membuat keputusan untuk menentukan standar hidup mereka jika terjadi kegagalan untuk mencapai kekayaan. Ketika pendapatan tidak langsung meningkat kesejahteraan ketika pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Todaro & Smith, (2015) menyatakan bahwa salah satu aturan yang kuat Mengurangi jumlah orang miskin adalah bantuan langsung dari otoritas publik kepada orang miskin. memberikan bantuan langsung dapat berupa bantuan keuangan, sponsor atau pengembangan kantor bantuan publik. Hal ini dilakukan agar orang miskin dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, membuat mereka terpuruk dan terhindar dari kemelaratan. Melalui bantuan keuangan untuk instruksi, untuk bekerja dengan masuk ke pelatihan sehingga mereka memiliki kapasitas dan berkualitas dan memadai di pasar kerja.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Palenewen et al, (2018) menemukan bahwa pengeluaran publik dari bidang kesejahteraan merupakan kepentingan dalam pembangunan keuangan. Biaya perawatan medis umum adalah konsumsi yang dibiayai oleh otoritas publik untuk administrasi kesejahteraan umum untuk mengerjakan bantuan pemerintah individu. Pengembangan layanan kesehatan lebih lanjut untuk anak-anak dari keluarga miskin adalah normal bahwa anak-anak akan memiliki kesehatan, keterampilan, dan efisiensi yang baik, sehingga mereka dapat diterima di pasar kerja dan mendapatkan gaji dengan demikian dan mengatasi masalah mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk perawatan kesehatan juga berkontribusi menghasilkan produktivitas yang baik dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dengan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja bekerja untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, pendapatan juga meningkat. Pada akhirnya menciptakan kegiatan ekonomi sebagai pemenuhan kebutuhan (Pratama et al., 2019).

Indeks Kemahalan Kontruksi

Indeks biaya konstruksi adalah nomor indeks yang menggambarkan perbandingan tingginya tingkat harga gedung/gedung di wilayah/kota atau provinsi pada umumnya ke daerah lain. IKK merupakan cerminan dari nilai bangunan atau harga yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit gedung/gedung per satuan luas di suatu wilayah/kota atau provinsi. IKK yang dihasilkan dari perkiraan harga beberapa barang/bahan bangunan dan jasa yang menjadi paket komoditas (BPS, 2017).

Menurut konsepnya, IKK diklasifikasikan sebagai indeks spasial, yaitu, indeks yang menggambarkan perbandingan harga di berbagai tempat selama tahun tertentu. Indeks biaya konstruksi adalah satu Variabel yang digunakan dalam perhitungan DAU. IKK dihitung sesuai konsep dikoreksi oleh Kejaksaan dan UU No. 33/2005. IKK dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu wilayah, semakin sulit pula letak geografis wilayah tersebut di daerah tersebut, semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut (BPS, 2017).

Upah Minimum Kabupaten/Kota

Upah minimum di Indonesia sejak Januari 2001, kewenangan untuk menetapkannya ditugaskan kepada gubernur. Kementerian Tenaga Kerja terus bertanggung jawab atas peraturan upah minimum. Upah minimum di Indonesia selain fakta bahwa standar hidup karyawan yang diambil alih harus ditingkatkan untuk menerima upah di bawah standar nasional dan untuk melindungi pekerja yang tidak mereka memiliki daya tawar karena surplus tenaga kerja tidak

terampil. Sebagai negara berkembang, upah juga merupakan cara untuk menjadi daya tarik bersaing dengan negara berkembang lainnya di kawasan Asia-Pasifik.

Kenaikan upah pekerja memiliki efek yang berkembang. Kesejahteraan dan pendapatan masyarakat untuk mendorong kegiatan membantu masyarakat keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Bisa upah minimum menjadi sarana untuk memerangi kemiskinan. Saat ada kenaikan ini terus meningkatkan produk domestik bruto per kapita untuk membuktikan efisiensinya area dalam produksi barang dan jasa menciptakan ekonomi yang baik. Ketika perekonomian daerah baik maka angka kemiskinan menurun (Kurniawati et al., 2017).

Produk Domestik Regional Bruto

Kemiskinan merupakan masalah mendasar dari setiap negara berkembang. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kepedulian terhadap perkembangan ekonomi negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berarti bahwa daerah itu mampu makmur. kemakmuran ekonomi dengan implikasi untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, syarat pertumbuhan ekonomi sudah cukup, artinya pertumbuhan ekonomi itu perlu dipastikan langsung di setiap sektor yang menerima tenaga kerja dari penduduk. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita adalah indikatornya yang terpenting adalah mengukur keberhasilan pembangunan daerah (Wijaksana, 2022).

METODE

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi opsional yang diperoleh langsung dari studi penulisan. Data tersebut berasal dari Badan Pengukuran Fokus (BPS) dan Layanan Uang serta penanganan informasi opsional, data yang berlaku dikumpulkan dari berbagai sumber, dan makalah serta artikel yang diunduh melalui Web. Informasi tambahan ini dapat diakses sebagai deret waktu dan informasi lintas segmen. Informasi deret waktu adalah informasi yang dikumpulkan secara rutin untuk waktu, jam, hari, minggu, bulan, kuartal, dan tahun. Informasi deret waktu adalah dari tahun 2015 hingga 2021. Informasi *cross-section* yang terjadi di wilayah/komunitas perkotaan di Wilayah Kalimantan Barat dengan model ekonometrik yang menyertainya:

$$PM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log(UMK)_{it} + \beta_2 \log(PDRB)_{it} + \beta_3 \log(PSP)_{it} + \beta_4 \log(PSK)_{it} + \beta_5 IKK_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana :

PM	= Peduduk Miskin (%)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah)
$PDRB$	= Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rp)
PSP	= Pengeluaran Sektor Pendidikan (Miliar Rp)
PSK	= Pengeluaran Sektor Kesehatan (Miliar Rp)
IKK	= Indeks Kemahalan Kontruksi (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_4$	= Koefisien
ε_t	= Variabel Pengganggu
i	= Provinsi ke i
t	= tahun ke t

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan kekuatan prakiraan Dari model yang dinilai. Tabel 4.2 terlihat nilai R^2 pada model *Random Effect Model* (REM) sebesar 0,483639 artinya 48,3% menyiratkan bahwa 48,3% variasi dalam variabel kebutuhan dapat dipahami oleh daerah dengan upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang, PDRB, IKK, pelatihan dan penggunaan area kesejahteraan. Selebihnya 51,7% dipengaruhi oleh faktor atau elemen berbeda yang dikecualikan dari model.

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi REM

Uji legitimasi dampak menganalisis makna dampak dari faktor otonom secara mandiri atau agak. Uji legitimasi dampak menggunakan uji t. Konsekuensi uji legitimasi dampak dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
LOG(UMK)	0,0080	< 0,10	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
LOG(PDRB)	0,9493	> 0,10	Tidak Signifikan
IKK	0,9378	> 0,10	Tidak Signifikan
LOG(PSK)	0,8789	> 0,10	Tidak Signifikan
LOG(PSP)	0,9858	> 0,10	Tidak Signifikan

Sumber: Eviews, diolah.

Interpretasi Pengaruh Variabel Independen

Mengingat uji legitimasi dampak pada Tabel 3, sangat mungkin terlihat bahwa utama Aturan Gaji Terendah yang Diperbolehkan oleh Undang-Undang (UMK) mempengaruhi kemiskinan (PM). Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), IKK, Pengeluaran kesehatan (PSK) dan pengeluaran pendidikan (PSP) tidak berpengaruh terhadap Kebutuhan pada masyarakat Lokal/Perkotaan di Wilayah Kalimantan Barat periode 2015-2021.

Variabel upah terendah yang diizinkan oleh hukum memiliki koefisien senilai - 1,896409, dengan desain hubungan linier-logaritma. Ini benar-benar berarti bahwa jika upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang meningkat sebesar 1%, kemiskinan akan berkurang sebesar 0,01896409 persen. Idealnya, Area Upah terendah yang diizinkan oleh undang-undang telah berkurang sebesar 1%, maka pada saat itu kebutuhan akan meningkat sebesar 0,01896409 persen.

Upah Minimum Kabupaten

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa UMK memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan. Dengan adanya standar upah minimum ditetapkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan bagi pekerja/karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas karyawan dapat meningkat. Ada juga melindungi pekerja agar tidak jatuh ke dalam perangkap kemiskinan.

Semakin tinggi UMK, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan tujuan penetapan UMK dalam keputusan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tetapkan upah minimum mendekati kebutuhan hidup minimum dan di atas garis kemiskinan sudah tepat karena dapat mengurangi kemiskinan (Aprilia, 2016). Menurut Boediono (2014) menaikkan upah minimum mekanisme untuk meningkatkan pendapatan kesejahteraan penduduk dan terakhir, upah minimum dapat mengurangi kemiskinan.

Sabyan & Widyanti (2022) menemukan hal yang sama bahwa UMK negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Utami & Masjkuri (2018) dan Sholihin & Wiwoho (2020) juga menemukan bahwa Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Produk Domestik Regional Bruto

Mengingat konsekuensi dari tinjauan tersebut, PDRB tidak mempengaruhi kemelaratan. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB bukan merupakan variabel penentu tingkat kemiskinan di daerah/masyarakat perkotaan di Kalbar. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis Sukirno, (2011) yang menurutnya menyebabkan perkembangan finansial dari tenaga kerja dan produk yang tak henti-hentinya diciptakan oleh tatanan sosial yang diciptakan. Namun dampak pembangunan ekonomi tidak terfokus pada masalah kemiskinan yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti transportasi, sarana dan penginapan, sehingga tidak mempengaruhi perekonomian di Daerah/Kota Kalimantan Barat.

Efek samping dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang diarahkan oleh Fadila dan Marwan (2020) bahwa tidak ada dampak besar antara perkembangan keuangan dan kebutuhan. Konsentrat lain oleh Nainggolan (2020) juga menunjukkan bahwa tidak ada dampak besar dari PDRB terhadap kemiskinan. Cenderung terlihat bahwa pembangunan keuangan tidak serta merta mengurangi kemiskinan dan seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pembangunan keuangan dan kemiskinan di Daerah/Kota Kalbar. Fajriansyah dan Chandriyanti (2022) juga menemukan hal yang sama bahwa PDRB mempengaruhi kemiskinan.

Indeks Kemahalan Kontruksi

Berdasarkan hasil kajian, IKK tidak efektif terhadap kemiskinan. Dalam hal ini infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah belum ada sama untuk setiap kabupaten/kota administratif. Itu mengatakan jarak jauh jalan aspal dimana setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda menyebabkan pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota penyebab kemiskinan yang terus tumbuh dan terjadi juga masih tinggi, karena tidak semua masyarakat menikmati kemajuan infrastruktur.

Infrastruktur dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi, untuk pengentasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan jika pembangunan baik dari segi kualitas infrastruktur yaitu efektif dan efisien. Pembangunan infrastruktur tidak dilakukan secara efisien dan efektif, jadi tidak ada dampak terhadap kemiskinan (Mantsani et al., 2019).

Dampak infrastruktur ketenagalistrikan terhadap perekonomian ternyata hanya kecil, jadi tidak terlalu bermanfaat untuk kesejahteraan publisitas. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pengembangan Infrastruktur yang kuat menguntungkan masyarakat di wilayah tersebut jika didukung perkembangan faktor lain ketika hanya menggunakan infrastruktur listrik maka manfaat yang diperoleh terbatas (Ayuandina, 2022). Putra & Yasa, (2020) menemukan bahwa Indeks Kemahalan Kontruksi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Penelitian yang sama ditemukan oleh Fardilla & Masbar, (2020) bahwa Indeks Kemahalan Kontruksi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengeluaran Sektor Kesehatan

Pengeluaran kesehatan tidak mempengaruhi kemiskinan karena Harapan hidup tidak menjamin seseorang bisa bekerja sangat Usia produktif, kesehatan fisik dan lebih banyak kesehatan mental mencerminkan kesehatan seseorang versus harapan hidup (Chairunnisa & Qintharah, 2022).

Pada tingkat makro, orang yang sehat merupakan faktor penting dalam memerangi kemiskinan dan tentunya sangat efektif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Akan tetapi masalahnya adalah bahwa biaya untuk pemerintah yang

diberikan tidak sesuai target penghargaan tidak dihitung ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi tidak semua orang masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor ketika sehubungan dengan kondisi geografis dan demografis Indonesia yang kompleks. Satu-satunya perbedaan adalah biaya infrastruktur, upah, dan peralatan lebih mahal kesehatan. Kurangnya akses ke tenaga medis, layanan dan fasilitas kesehatan. Kesehatan adalah alasan orang tidak dapat meningkatkan kesehatan mereka yang mempengaruhi kualitas hidup (Hidayat & Azhar, 2022).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wardhana & Kharisma, (2019) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengeluaran sektor kesehatan dengan kemiskinan. Studi lain oleh Isman (2020) juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan pengeluaran sektor kesehatan terhadap kemiskinan. Fajriansyah & Chandriyanti, (2022) juga menemukan hal sama bahwa pengeluaran sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Pengeluaran Sektor Pendidikan

Tidak signifikan dari pengeluaran pemerintah untuk kemiskinan disebabkan oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, misalnya, program bantuan tunai, proyek kartu pelajar yang brilian, alokasi dan tugas-tugas lain yang tidak terlalu ditentukan. Signifikansi pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan dibuat oleh pengeluaran pemerintah untuk pelatihan, misalnya, program bantuan tunai, Proyek Kartu Mahasiswa Cemerlang, penghargaan dan kegiatan lain yang tidak sesuai rencana. Pengaturan yang salah menyebabkan kesalahan dalam menentukan siapa yang nanti dan siapa yang tidak bisa sehingga pengeluaran pemerintah dapat membantu masyarakat dengan sukses hingga orang miskin.

Karena sebagian besar program sekolah yang diberikan oleh otoritas publik hanya dalam bentuk uang riil untuk mengurus biaya penggunaan orang miskin. Sebaliknya, program belanja pemerintah lebih berpusat pada program belanja, sehingga tidak mempengaruhi tingkat kebutuhan secara lokal (Putria dan Putri, 2021).

Hasil akhir dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dipimpin oleh Pusparani, (2022) bahwa tidak ada dampak yang besar antara belanja daerah dan kemiskinan. Konsentrat lain oleh Abdullah et al., (2020) juga menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang besar dari pengeluaran pendidikan terhadap kemiskinan. Demak et al., (2020) juga menemukan hal yang sama bahwa pengeluaran pelatihan mempengaruhi kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Model Estimasi *Random Effect Model* (REM) dipilih sebagai estimasi terbaik. Variabel upah minimum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah/kota administratif provinsi Kalimantan Barat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), indeks biaya konstruksi (IKK), Belanja Sektor Kesehatan (PSK) dan Belanja Sektor Pendidikan (PSP) tidak mempengaruhi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat akan mengalami penurunan pada saat realisasi belanja kesehatan pemerintah dan peraturan upah minimum regional dinaikkan.

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mengarah pada kebijakan daerah. Alokasi belanja kesehatan proporsional, efisien dan efektif jadi tepat sasaran. Penetapan upah merupakan upaya untuk menaikkannya kesejahteraan karyawan dan upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian secara umum. Dengan kenaikan upah minimum regional, standar meningkat. Pengalaman pekerja minimum, dimulai dengan kesehatan, nutrisi, dan pelatihan yang tepat yang meningkatkan kesejahteraan karyawan. Pemerintah dapat menerapkannya di masa depan,

fokusnya kembali pada peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kualitas pendidikan, guru dan siswa, belum tereksplotasi secara maksimal. Untuk pembangunan infrastruktur, yang memiliki manfaat tidak langsung.

Untuk pemeriksaan di masa depan, adalah normal untuk menggunakan berbagai faktor yang lebih rumit dan diperkirakan dengan asumsi variabel digunakan untuk memahami unsur-unsur yang membentuk kemelaratan. Strategi bebas yang digunakan dalam eksplorasi ini belum sepenuhnya berfungsi dalam memahami variabel yang menyebabkan kebutuhan di suatu ruang. Selain itu, ilmuwan masa depan diharapkan dapat menggunakan perangkat logika yang rumit dan tepat untuk memahami unsur-unsur kemiskinan di suatu ruang dalam jangka pendek dan panjang.

REFERENSI

- Abdullah, S., Hasid, Z & Pongtuluran, Y. (2020). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemiskinan kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 5(1).
- Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2013). *Jurnal ilmiah mahasiswa*, 1(1), 1-10.
- Ayuandina, F. G. (2022). Analisis Determinan Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Bappenas. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Boediono. (2014). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- BPS. (2017). *Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Kontruksi*. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Badan Pusat Statistik.
- Chairunnisa, M. N & Qintharah, Y. N. (2022). Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020. *Jurnal PETA*, 7(1), 147-161.
- Demak, S. N. K., Masinambow, V. A. J & Londa, A. T. (2020). Pengaruh Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan Belanja Modal dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(01).
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120.
- Fardilla, S & Masbar, R. (2020). Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, Sekolah, dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 5(3), 175-183.
- Fajriansyah, S & Chandriyanti, I. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(2), 558-570.
- Hidayat, A. Y & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 65-74.
- Islami, I., Nadia, A., Anis, A. (2013). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal of Chemical Information and Modeling*. 53(9), 1689–1699.
- Isman, M. F. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingginya Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2015-

- 2019 (Studi Kasus Provinsi Dengan Tingkat Kemiskinan Tinggi. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta*.
- Khoirudin, R & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2005-2013. *Tirtayasa Ekonomika*. 15(1), 17-30
- Kinanti, R. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 1(1): 249–259.
- Kurniawati, A., Beni T. G, & Disty P. R. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*. 17(2): 233.
- Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K & Sugiarto. (2019). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017 (Determinant Poverty Of Aceh Province 2017). *Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDGs*.
- Muhammad, S. Z., Sapha, T., Fitriyani, D., & Jumadil, S. (2019). Investigating the public spending and economical growth on the poverty reduction in Indonesia. *Industrial Engineering and Management Systems*. 18(3): 495–500.
- Nainggolan, E. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (2010-2019). *Manajemen Bisnis Eka Prasetya*, 6(2), 61–74. <https://doi.org/10.47663/jmbep.v6i2.58>.
- Palenewen, T. O., Walewangko, M. N & Sumujal, J. I. (2018). Kebudayaan di Sulawesi Utara. *Tim Peneliti Politeknik Negeri Manado*. 18(04): 52–61.
- Pratama, N., Suda, R. N., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 8(7). 651-680.
- Pusparani, A. D. (2022). Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Subsidi Dengan Tingkat Kemiskinan. *JEPA*, 7(1), 153-161.
- Putra, I. K. A & Yasa, I. G. W. M. (2020). Pengaruh Infrastruktur dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 10(3), 1041 – 1070.
- Putria, E. R & Putri, P. D. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*. 10(2), 106-114. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>
- Rozali, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Implikasinya terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi*. 22 (1), 11-12.
- Sabyan, M & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *Menara Ekonomi*, 8(3).
- Sari, J & Mangkuwinata, D. S. (2017). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 18(2): 94–107.
- Sholihin, M. K., & Wiwoho, B. (2020). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(September), 12–26. <https://doi.org/10.1234/jeb17.v5i2.5677>.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, E & Sartiyah. (2019). Determinan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Dimensi*. 8(2): 249–265.
- Todaro, M. P, & Smith, S. C. (2015). *Economic development 12th Edition*. United States of America : Pearson.
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum,

- Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pendidikan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 4(01), 11–20. 10.20473/jeba.V28I22018.5822.
- Wardhana, A & Kharisma, B. (2019). Peran Pengeluaran Sektor Pendidikan Dan Sektor Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (12).
- Widodo, W., Adi, A., Waridin, W., & Kodoatie, J. M. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*. 1(1), 25.
- Wijaksana, A. C. (2022). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Periode Tahun 2016-2021. *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 99-113.